



**BUPATI ACEH TENGAH  
PROVINSI ACEH**

بوفتي اچيه تغه  
فروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH (PT. BPRS GAYO) TAKENGON  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (PT. BPRS GAYO) Renggali Takengon dan guna meningkatkan pelayanan terhadap para nasabah dipandang perlu adanya penambahan penyeteroran modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gayo (PT. BPRS GAYO) Takengon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pedoman Pendirian Perusahaan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505);

4.undang .....

P

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS Renggali) Kabupaten Aceh Tengah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS GAYO) TAKENGON TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I.....

*P*

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
- d. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah PT. BPRS Gayo Takengon.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- f. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah guna meningkatkan kinerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penambahan penyertaan modal daerah Tahun 2022 pada PT. BPRS GAYO Takengon ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah,-).

Pasal 4

Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah investasi yang bersifat permanen dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV.....  


BAB IV  
PENGANGGARAN  
Pasal 5

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 6

PT. BPRS GAYO Takengon setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI ACEH TENGAH  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH

SUBHANDHY

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1047